

**IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KAB. TAKALAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

**ADELINA KADIR**

**10400116012**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelina Kadir  
Nim : 10400116012  
Tempat/tgl. Lahir : Paddinging, 15 Agustus 1998  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Hamzah Dg. Tuppu Paddinging No. 25  
Judul : Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kab. Takalar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Juli 2020



ADELINA KADIR

NIM : 10400116012

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kab. Takalar** ” yang disusun oleh **Adelina Kadir**, Nim 10400116012, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Takalar, 20 Juli 2020 M  
10 Dzulqaidah 1441 H

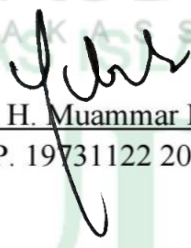
### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M. Hum. (.....)	
Munaqisy I	: H. Zulfahmi S.Ag., M.Ag. ph.D (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Fatmawati M.Ag (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Andi Safriani M.H (.....)	
Pembimbing II	: Sitti Nurjannah S.H., MH (.....)	

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

  
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

NIP. 19731122 200012 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak tertepi, doa yang tak pernah terputus dari kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Abd.Kadir dan Ibuku Benati, yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. dan beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kab.Takalar.”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya sangat hormati :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhanis MA Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, M.H Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan orang tua penulis jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan penuh candaan.
4. Ibu Dr. Andi Safriani M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing I yang perhatian dan senantiasa membimbing dengan sabar.
5. Ibu Sitti Nurjannah S.H.,MH sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing II yang perhatian dan senantiasa sabar.
6. Bapak H. Zulfahmi S.Ag.,M.Ag. ph.D sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Penguji I Terima kasih banyak .
7. Ibu Dr. Fatmawati M.Ag sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Penguji II Terima kasih banyak atas perhatian dan masukan-masukannya.
8. Seluruh Dosen, pejabat dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan dosen jurusan Ilmu Hukum pada khususnya yang senantiasa mengajar penulis.

9. Anggota Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar serta Masyarakat Takalar, yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung selama penelitian.
10. Seluruh teman-teman yang kerap kali membantu, Siti Ramdhani Mukarramah, Iksan ariansyah muhtar, Nur Fatma anggraeni, Rahma, Nur Asmi, Islamiani Azis, Nur indah sari pb, Indah syari, Irdyanti, Ardi dan Sry rejeki.
11. Senior-senior yang membantu dalam proses perjuangan, memberikan bantuan, dukungan yang tiada hentinya dan untuk semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, serta teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum UINAM, serta teman-teman PPL Kejaksaan Negeri Takalar dan KKN Desa Paladang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang angkatan 63.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri, serta umumnya bagi kita semua.

Makassar, 3 Juni 2020



ADELINA KADIR

NIM: 10400116012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTARK .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perwakilan	
1. Pengertian Perwakilan.....	12
2. Teori-teori Perwakilan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	
1. Perempuan Dalam Politik.....	16
2. Aturan Tentang Kuota 30% Perempuan.....	18
C. Pemilihan Umum Legislatif	
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	19
2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.....	20
3. Penyelenggara Pemilihan Umum .....	22
4. Sistem Pemilihan Umum.....	22
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	
1. Pengertian DPRD .....	27
2. Syarat-syarat Menjadi Anggota DPRD .....	27
3. Hak Anggota DPRD Kab/Kota .....	31
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Metode Pendekatan .....	33

C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Instrument Penelitian .....	36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	36

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Lokasi Penelitian .....	38
B. Keterwakilan Perempuan Di Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kab. Takalar .....	43
1. Daftar Calon Legislatif dari Partai Politik Yang Ada di Kab. Takalar.....	44
2. Daftar persentase calon anggota legislatif dan anggota legislatif Kab. Takalar. ....	66
3. Daftar Anggota legislatif Perempuan yang Lolos dari berbagai partai-partai ke Kursi DPRD Kab. Takalar .....	67
C. Faktor Penghalang Dan Pendukung Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kab. Takalar. ....	68

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Implikasi Penelitian.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
--------------------------------	-----------



.....

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
اِ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan yā'	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...   اَ...	<i>fathah</i> dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan yā'	I	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.=

3. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## **ABSTRAK**

**Nama : Adelina Kadir**  
**Nim : 10400116012**  
**Fak/Jur : Syari'ah & Hukum / Ilmu Hukum**  
**Judul : IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KAB.  
TAKALAR**

---

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar serta keterwakilan perempuan dalam ranah politik yang jauh dari angka yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu sebanyak 30% namun pada kenyataannya pada pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar pada Tahun 2019 hanya dalam angka 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar tidak terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 30% kuota keterwakilan perempuan. Sehingga dilakukanlah penelitian guna mengetahui apa penyebab sehingga keterwakilan perempuan tersebut tidak terpenuhi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melakukan jalannya penelitian maka hal-tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang diinginkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Anggota DPRD Kab. Takalar berjumlah 30 orang dan diantara jumlah tersebut anggota DPRD perempuan berjumlah 8 orang. 2) faktor penghambat terkait keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar itu dikarenakan kurangnya kader perempuan di dalam partai politik dan faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar dikarenakan adanya aturan dari Undang-Undang yang mengharuskan partai politik memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Implikasi Penelitian Perempuan seharusnya dapat menyadari akan peluang besar yang mereka miliki untuk ikut serta ke ranah politik demi untuk memperjuangkan Hak-hak kaum perempuan karena sangatlah penting jika seorang perempuan dapat duduk di kursi legislatif. Seharusnya partai politik dalam hal perekrutan untuk menjadikan kadernya sebagai calon legislatif harus betul-betul karena kader tersebut mampu bukan karena hanya untuk memenuhi kuota 30 % yang sudah ditetapkan oleh UU Karena dalam perekrutan calon legislatif partai politik harus mengedepankan potensi suara yang dimiliki serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon legislatif tersebut.

**Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun demikian sistem pemilihan umum demokrasi tidak sama disemua negara. Hal itu ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan model demokrasi yang diterapkannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu proses-proses tentang politik ataupun tentang pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali bukan suatu jaminan sehingga para kaum perempuan dapat menjadi wakil rakyat.

Penetapan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga mulai memperjelas jadwal pemilihan pemimpin Politik Indonesia. Kodifikasi hukum dalam Undang-Undang ini memudahkan proses demokrasi berkala yang dilakukan di Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia UU RI No 39 tahun 1999 memberikan bagian khusus terhadap hak-hak wanita di mana dalam Pasal 46 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan dan Pasal 49 di mana wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratam dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dibidang politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam Pendirian dan pembentukan

---

<sup>1</sup>Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.109.

Partai Politik memasukkan (tiga puluh persen) keterlibatan perempuan serta Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa pengurusan Parpol ditingkat nasional disusun dengan memasukkan minimal 30% (tiga puluh persen) keterlibatan perempuan. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut perempuan juga memiliki peran dalam kepengurusan di Partai Politik. Selanjutnya untuk meningkatkan peran perempuan dipemerintahan maka diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 2 tahun 2011 yakni bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan.

Kuota 30% untuk perempuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sebenarnya menjadi peluang yang sangat baik bagi semua perempuan yaitu perempuan memiliki banyak kesempatan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Jika kita lihat kesetaraan perempuan yang ada di dalam UU tentang persoalan ketentuan para calon perempuan yaitu 30%, mestinya telah mencapai ketentuan tersebut bukan malah lebih kurang dari ketentuan yang ada di dalam UU lihat saja kenyataan atau fakta sebenarnya kuota 30% tersebut belum sepenuhnya terisi dalam kursi-kursi untuk menjadi para wakil rakyat yaitu sebagai anggota DPRD Kab/kota dan DPRD provinsi.

Keterlibatan perempuan dalam politik juga banyak dipengaruhi karena gender. Gender menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan atau disebut sebagai penghalang dan pemicu bagi kaum perempuan untuk melangkah ke ranah politik karena gender merupakan salah satu aspek yang mencolok diantara aspek-aspek lainnya seperti aspek Suku, Agama, Ras, dan golongan. Hubungan antara politik dan gender diketahui dalam keluarga yaitu suami dan istri yang sampai pada tahapan masyarakat luas, contohnya dalam hubungan kekuasaan dan kepemimpinan. Dapat kita ketahui bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu sangatlah bermacam-macam makna dan artinya.



Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi keadilan. Ternyata dalam setiap aspek politik yang dilakukan masih cenderung dominan laki-laki yang terpilih *because such negative assumptions have become public opinion due to the first opinion built by history*<sup>2</sup>. seharusnya Indonesia lebih banyak melibatkan para kaum perempuan atau memberikan peluang untuk ikut serta dalam pengambilan setiap keputusan di parlemen.

Berdasarkan QS. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki, baik fisik atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.<sup>3</sup>

Kandungan (QS. Al-Hujurat (49): 13) yaitu: makhluk ciptaan Allah swt seperti manusia itu ada dua yaitu kaum laki-laki dan kaum perempuan (QS. Al-Hujurat (49): 13) menerangkan bahwa makhluk ciptaan Allah swt yaitu manusia hanya dua bukan tiga atau lebih. Manusia tercipta dari hubungan antara suami dan istri tentang pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang menghasilkan suatu pembuahan. Manusia diciptakan untuk mudah dikenali mana manusia yang baik

---

<sup>2</sup>Fatmawati, Muhammad Shuhufi, *women's political rights in Islamic law perspective (analysing the implementation in Indonesia political system)*, h.3.

<sup>3</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.412.

dan mana manusia yang buruk. Manusia diciptakan untuk saling berteman dan tidak untuk berkelahi. Kedudukan seseorang baik laki-laki ataupun perempuan semuanya sama di hadapan Allah swt maupun dihadapan hukum. Karena yang dibenci oleh Allah swt hanyalah orang-orang yang tidak bertaqwa kepadanya dan yang di mulia di matanya hanyalah orang-orang yang ikhlas dan berbakti pada kedua orang tua bukan yang berada ataupun orang kaya.

Terlihat bahwa perempuan sejak dahulu telah memperjuangkan suara mereka agar bisa didengar dan dapat direalisasikan dalam kehidupan. Demikian pula di (DPRD) Kab/kota, perempuan berusaha untuk memperoleh kursi agar dapat duduk menjadi anggota DPRD Kab/kota dengan tujuan dapat menyampaikan aspirasi perempuan bahwa jumlah keterwakilan perempuan sekarang ini dalam lembaga-lembaga politik yang dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh yang berarti dalam politik .

Dalam tradisi masyarakat nusantara, posisi dan peran perempuan tidak begitu banyak diperhatikan sebagai sesuatu yang penting, masih kuat anggapan yang secara luas diterima sebagai sebuah keniscayaan yakni perempuan berkaitan urusan-urusan domestik rumah tangga, inilah yang menjadi dasar mengapa RA Kartini melakukan protes terhadap dominasi laki-laki pada akhir abad ke 19. Dalam konteks politik Indonesia, gerakan Kartini telah menjadi simbol dari kebangkitan perempuan Indonesia dan setiap tanggal 21 April dijadikan sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut harapan agar perempuan duduk sebagai anggota DPRD Kab/kota juga dapat meningkat hingga 30% sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan juga akan meningkat. Perempuan dalam ranah politik itu tidak

---

<sup>4</sup>Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia*, (Makassar:Alauddin University Press, 2012), h.188-189.

gampang karena adanya budaya patriarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala. Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat rendah sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi sosial).

Keseimbangan tentang gender adalah sebuah konsep yang sulit dan mengalami banyak percekocokan dan kendala-kendala yang mengakibatkan kontroversi besar. Sampai saat ini perbincangan tentang keadilan gender antara perempuan dan laki-laki belum ada habisnya. Karena banyaknya yang mengatakan kesetaraan gender merupakan persamaan antara hak dan kewajiban kaum laki-laki dan perempuan yang belum ada titik terangnya atau belum jelas. Serta ada pula beberapa orang mengatakan bahwa arti dari kesetaraan gender yaitu tentang sejajarnya antara laki-laki dan perempuan hal ini pun belum ada kejelasannya. Serta ada pula yang mengatakan bahwa kesetaraan gender yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama antara keduanya baik dalam melakukan pekerjaan, sesuai dengan derajatnya<sup>5</sup>. Gender adalah distingsi perilaku yang universal didalam budaya –budaya vernakuler. Konsep gender membedakan waktu, tempat, peralatan, tugas-tugas, gerak-gerik, bentuk tuturan, dan bermacam persepsi antara yang diasosiasikan pada laki-laki dan yang disosiasikan pada perempuan<sup>6</sup>

Politik identik dengan kekuasaan dimana sering terjadi perebutan bagi seseorang untuk menjadi penguasa, dan yang paling banyak diperebutkan seseorang yaitu kursi parlemen sebagai wakil rakyat. Karena kekuasaan merupakan

---

<sup>5</sup>Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 59.

<sup>6</sup>Ery iswary, *perempuan makassar relasi gender dalam folklore*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), h.17.

kemampuan seseorang dalam suatu hubungan sosial untuk menjamin dirinya untuk melakukan ataupun menentukan tindakannya.<sup>7</sup>

Hal ini karena adanya persepsi dan konstruksi sosial yang menutup akses kaum perempuan untuk banyak berkiprah dalam bidang politik sehingga yang terjadi karena banyaknya dominasi kaum laki-laki di DPR RI , DPRD Provinsi , DPRD Kab/kota adalah ketika perempuan duduk dalam lembaga legislatif dimana, perempuan harus berkomunikasi dengan tegas dan berani jika sedang melakukan diskusi dengan anggota laki-laki sehingga dapat mengimbangi anggota laki-laki. Hal ini lakukan agar suara perempuan didengar dan direalisasikan. Untuk itu sangat diperlukan strategi dalam berkomunikasi dan strategi perempuan itu sendiri agar mendapatkan perhatian dari anggota laki-laki. Namun dalam hal ini perempuan didukung oleh aliran yang bernama aliran Feminisme. Aliran feminisme adalah sebuah kesadaran tentang ketidakadilan yang sistematis bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.<sup>8</sup> Aliran feminisme ini merupakan suatu perkumpulan para pejuang bangsa bagi kaum perempuan.<sup>9</sup> Para feminisme mempunyai kesadaran yang sama akan terjadinya ketidakadilan gender, tetapi mereka berbeda dalam menganalisis sebab-sebabnya, hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan aliran feminis termasuk didalamnya adalah bentuk, target dan strategi perjuangan yang mereka lakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Ni'matul huda, *ilmu negara*, (Depok: PT. rajagrafindo persada,2015), h.107.

<sup>8</sup>Bhasin dan khan , *persoalan pokok mengenai femanisme dan relevansinya*, (Jakarta: gramedia pustaka utama, 1995). h.5.

<sup>9</sup>Kadariusman, *Agama, relasi dan feminism*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2005). h.27.

<sup>10</sup>Tri Lisiani Prihatinah, *Hukum dan kajian Gender*, (Semarang: Badan penerbit universitas diponegoro,2010), h.28.

Hal-hal yang menyebabkan Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik yaitu Masih adanya pemikiran tentang kecenderungan seseorang menempatkan seorang kaum perempuan dibawah kepemimpinan serta kekuasaan kaum laki-laki. Karena perempuan sampai saat ini masih dianggap sebagai makhluk yang sangat lemah dibandingkan dengan laki-laki yang dianggap sebagai makhluk yang kuat dan berkuasa. Maka dari itu fakta-fakta terus bermunculan di lingkup kita seperti dalam ranah politik keikutsertaan perempuan sangatlah minim dibandingkan dengan keikutsertaan laki-laki dalam ranah politik dapat dikatakan bahwa jumlah keikutsertaan perempuan dengan laki-laki sangatlah berbanding terbalik karena mayoritas politik digerakkan oleh kaum laki-laki. Dan kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kecerdasan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fakta mengatakan bahwa perempuan juga dapat memimpin suatu negara contohnya Ibu Megawati Soekarno Putry yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia satu-satunya perempuan maka dari situlah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kaum perempuan juga bisa. Jadi perempuan dan laki-laki harus mendapat keadilan yang sama.

Pada tataran kenyataannya keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% namun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Kabupaten. Takalar karena jumlah keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%.

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar tahun 2019.

## **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa penelitian ini dibatasi pada implementasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif, penulis memberikan deskripsi fokus.

Pemilihan Umum adalah suatu proses yang diadakan oleh negara Indonesia setiap lima tahun sekali dan rakyatlah sebagai orang yang ikutserta dalam agenda per lima tahun tersebut untuk memilih calon-calon wakil rakyat serta calon Presiden dan calon wakil Presidenya. Pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat tersebut dilaksanakan serentak/bersamaan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Agenda ini dilakukan karena peraturannya sudah tertera di dalam UUD 1945. Peraturan perundang-undangan terkait keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum yaitu terfokus pada UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kab. Takalar berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Keterlibatan perempuan dalam Partai Politik di Kab. Takalar dalam 5 tahun belakangan ini mengalami peningkatan dikarenakan perempuan memiliki peluang yang sangat besar karena adanya dukungan dari Undang-Undang bahwa setiap Partai dalam kepengurusannya harus ada 30% keterwakilan perempuan. Serta keterlibatan perempuan sebagai calon anggota legislatif tahun 2019 di Kab. Takalar juga mengalami peningkatan karena sudah adanya kesadaran dari kaum perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif serta adanya dukungan dari Partai Politik.

## **C. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana keterwakilan perempuan di Dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019 di Kab. Takalar?

- 2) Bagaimana faktor penghalang dan pendukung perempuan dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019 di Kab. Takalar?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1) Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan seperangkat kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian, serta sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.<sup>11</sup> Dan ini diambil dari pokok-pokok permasalahan pada judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan didalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019 di Kab. Takalar
- b. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghalang dan pendukung perempuan dalam keterwakilannya didalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019 di Kab. Takalar

##### **2) Kegunaan penelitian**

Kegunaan-kegunaan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi penelitian yaitu sebagai berikut.

###### **a. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian tentang keterwakilan perempuan di DPRD dan Partai Politik Kabupaten Takalar dapat menjadi sumbangsi pemikiran kepada para masyarakat umum yaitu khususnya pada masyarakat yang ada dalam wilayah hukum DPRD Kabupaten Takalar.

---

<sup>11</sup>Anonym, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Puwokerto:STAIN Press, 2014). h.5.

b. Kegunaan ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan ataupun saran dari pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

**E. Kajian pustaka**

Dalam penelitian ini saya memerlukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian saya seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh ST. MUFLIAH RAHMAH yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai”. Skripsi ini menulis tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai yang belum terpenuhi karena politik identik dengan laki-laki karena mitos yang berkembang di masyarakat di Sinjai perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh NUNI SILVANA yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif”. Skripsi ini menulis tentang Keterlibatan perempuan dalam politik juga banyak dipengaruhi karena gender. Gender menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan atau disebut sebagai penghalang dan pemicu bagi kaum perempuan untuk melangkah ke ranah politik karena gender merupakan salah satu aspek yang mencolok diantara aspek-aspek lainnya seperti aspek Suku, Agama, Ras, dan Golongan. Hubungan antara politik dan gender diketahui dalam keluarga yaitu suami dan istri yang sampai pada tahapan masyarakat luas, contohnya dalam hubungan kekuasaan dan kepemimpinan. Dapat kita ketahui bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu sangatlah bermacam-macam makna dan artinya.



3. Penelitian yang dilakukan oleh DIAN PRATIWI yang berjudul “ Hubungan Calon Legislatif Dengan Konstituen Pada Dapil 4 Kecamatan Manggala-Panakkukang Kota Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014”. Skripsi ini menulis tentang masalah teori-teori perwakilan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh FATMAWATI yang berjudul “Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan (Studi Pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan)” Disertasi ini menulis tentang bagaimana hak Politik bagi seorang perempuan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perwakilan**

##### **1. Pengertian Perwakilan**

Perwakilan merupakan konsep tentang seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.<sup>1</sup> Perwakilan adalah orang yang mewakili suatu kelompok dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya. Karena rakyat tidak dapat menjakankan tugas kenegaraan seorang diri butuh seseorang untuk menjadi wakilnya. Maka dari itu rakyat harus mempunyai perwakilan di pemerintahan agar segala kepentingan-kepentingan yang ingin rakyat suarakan dapat disampaikan melalui wakilnya.

Di Indonesia perwakilan diwujudkan dengan di bentuknya lembaga perwakilan rakyat atau biasa disebut DPR yang terbagi dalam beberapa bagian yaitu seperti DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan cara pemilihan umum. Jadi setelah terpilihnya wakil rakyat tersebut maka rakyat dapat menyalurkan suara atau aspirasi kepada wakilnya yang telah terpilih lewat (pemilu).

Perwakilan politik merupakan perwakilan yang berdasarkan Partai Politik, sering di kritik kurang melibatkan kelompok-kelompok diluar Partai Politik oleh karena itu lahirlah tuntutan perlunya perwakilan fungsional/kepentingan.

---

<sup>1</sup>Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.68.

Alasannya sebab dalam kenyataan negara-negara dikuasai oleh bermacam-macam kepentingan ekonomis.<sup>2</sup>

Walaupun banyak perbedaan pemahaman tentang perwakilan baik antara kelompok maupun perorangan. Akan tetapi perbedaan-perbedaan pemahaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai permasalahan karena setiap orang memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda. Dapat kita ketahui bahwa setiap katapun memiliki lebih dari satu makna tergantung dari pemahaman seseorang. Perwakilan ada karena rakyat maka wakil-wakil tersebut harus mendengar permasalahan yang di suarakan rakyat kepadanya dengan tujuan rakyat akan percaya kepadanya.

Menurut Sharon Bessel, dalam rangka untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen terdapat tiga model yang dipraktekkan: Pertama, memperluas kesempatan perempuan untuk menjadi anggota DPR melalui kebijakan- kebijakan strategis. Kedua, merancang sistem pemilu proporsional yang memberi peran parpol untuk menempatkan calon berdasarkan nomor urut. Ketiga, memberi kuota khusus perempuan dalam pemenuhan daftar calon yang harus ditaati oleh partai politik.<sup>3</sup>

## **2. Teori-Teori Perwakilan**

Ada beberapa teori yang membahas tentang hubungan antara wakil dengan yang diwakili ini, yaitu:

a. Teori Mandat, merupakan seorang wakil rakyat dikatakan duduk dalam kursi ke lembaga apabila telah mendapat mandat dari rakyat di lembaga perwakilan

---

<sup>2</sup>Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.68

<sup>3</sup>Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indenesia*, (Yogyakarta: ThafaMedia, 2016), h.127.

dengan cara melakukan pemilihan secara langsung yaitu pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1). Mandat Imperatif merupakan suatu teori yang mengharuskan para wakil rakyat untuk tetap mendengarkan rakyat yang dalam artianya bahwa dia adalah orang yang dipercaya untuk mewakili rakyat di parlemen maka dari itu wakil rakyat tersebut tidak dapat bertindak jika diluar perintah jika ada permasalahan yang belum ada dalam aturan maka wakil rakyat harus mendengar kembali perintah jika ada aturan baru.

2). Mandat Bebas merupakan suatu teori yang membebaskan para wakil rakyat untuk mengambil keputusan ataupun bertindak karena teori ini tidak serta merta harus mendengarkan suara atau perintah dari rakyat karena dapat kita ketahui bahwa wakil rakyat merupakan pilihan yang telah dipercayai oleh rakyat. Akan tetapi walaupun teori mandat bebas ini membuka peluang bagi para wakil rakyat untuk membuat keputusan dia tidak boleh menghancurkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyatnya.

3). Mandat Representatif merupakan suatu teori mandat yang menganggap bahwa wakil rakyat bersekutu didalam lembaga perwakilan artinya bahwa rakyat memilih wakil rakyatnya akan tetapi mandat tersebut diberikan kepada lembaga yang akan menerima para wakil rakyat tersebut. Karena wakil rakyat merupakan seseorang yang dalam artian tidak ada jalinan hubungan dengan para rakyat yang memilihnya dan tidak memberi pertanggung jawaban para rakyatnya melainkan yang memberikannya tersebut yaitu lembaganya.

b. Teori Organ, menurut ajaran Von Gierke (Jerman) yaitu Negara merupakan satu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen, dan rakyat yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri namun antara satu dengan lainnya saling berkepentingan. Dengan demikian, setelah rakyat memilih lembaga

perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga ini bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Menurut penulis teori organ hampir sama dengan teori mandat bebas dikarenakan teori ini tidak memberikan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapatnya karena rakyat disini memiliki fungsi tersendiri namun dalam artian saling memiliki kepentingan satu sama lain maka dari teori inilah wakil rakyat dapat mengambil keputusan diluar kendalinya karena bebas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>4</sup>

c. Teori Sosiologi menurut penulis teori ini sangatlah mengutamakan masalah kemasyarakatan dikarenakan teori sosiologi ini menganggap bahwa lembaga perwakilan adalah milik masyarakat bukan milik polititisi karena rakyatlah yang memilih wakilnya untuk berada pada posisi dimana dia menjadi anggota yang berada dalam lembaga perwakilan tersebut tanpa adanya rakyat maka lembaga perwakilan tersebut tidak akan terwujud. Wakil rakyat dipilih untuk mendengarkan suara rakyat apa yang rakyat inginkan untuk dapat memakmurkan rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut Rieker, ajaran ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan suatu bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Para pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan bersungguh-sungguh membela kepentingan pemilih. Sehingga lembaga perwakilan yang terbentuk itu terdiri dari golongan-

---

<sup>4</sup>Dian Pratiwi, Hubungan Politik Calon Legislatif dengan Konstituen pada Dapil 4 Kecamatan Manggala – Panakkukang Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2014, h.15-17. repository.unhas.ac.id. (Diakses 20 september 2019).

<sup>5</sup>Dian Pratiwi, Hubungan Politik Calon Legislatif dengan Konstituen pada Dapil 4 Kecamatan Manggala – Panakkukang Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2014, h.15-17. repository.unhas.ac.id. (Diakses 20 september 2019).

golongan dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat yaitu bahwa lembaga perwakilan itu tercermin dari lapisan masyarakat yang ada.

d. Teori Hukum Obyektif menurut penulis teori hukum obyektif merupakan suatu teori yang sangat penting dikarenakan teori membuat rakyat dan wakil rakyat saling memberikan kepercayaannya satu sama lain karena teori ini menganggap bahwa wakil rakyat dan rakyatnya memiliki hubungan yang sangat erat dikarenakan keduanya saling membutuhkan satu sama lain. contohnya jika rakyat tidak ada maka wakil rakyat pun tidak akan terbentuk dan sebaliknya jika wakil rakyat tidak ada maka rakyat tidak ada apa-apanya dikarenakan rakyat tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh wakil rakyat maka dari itu rakyat memberikan suaranya melalui pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam masa jabatannya. Pengertian lain tentang teori hukum obyektif yaitu hubungan antara rakyat dan parlemen dasarnya adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakil-wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Dengan demikian ada pembagian kerja antara rakyat dan parlemen.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan**

### **1. Perempuan Dalam Politik**

Perempuan dalam politik telah mendapat payung hukum sehingga perempuan dapat ikut serta dalam pemilihan umum dan menjadi calon legislatif serta dapat dipilih dan terpilih agar jumlah perempuan dalam ranah politik

---

<sup>6</sup>Dian Pratiwi, Hubungan Politik Calon Legislatif dengan Konstituen pada Dapil 4 Kecamatan Manggala – Panakkukang Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2014, , h. 15-17. repository.unhas.ac.id. (Diakses 20 september 2019).

meningkat agar dapat menyeimbangkan dirinya dengan laki-laki sehingga kesetaraan dapat terwujud. Dan UU yang dibuat oleh para wakil rakyat tidak menjadi sia-sia jika tidak terlaksana.

Keterlibatan perempuan dalam politik juga banyak dipengaruhi karena gender. Gender menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan atau disebut sebagai penghalang dan pemicu bagi kaum perempuan untuk melangkah ke ranah politik karena gender merupakan salah satu aspek yang mencolok diantara aspek-aspek lainnya seperti aspek Suku, Agama, Ras, dan Golongan. Hubungan antara politik dan gender diketahui dalam keluarga yaitu suami dan istri yang sampai pada tahapan masyarakat luas, contohnya dalam hubungan kekuasaan dan kepemimpinan. Dapat kita ketahui bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu sangatlah bermacam-macam makna dan artinya.<sup>7</sup>

Terlihat bahwa perempuan sejak dahulu telah memperjuangkan suara mereka agar bisa didengar dan dapat direalisasikan dalam kehidupan. Namun hasil yang diperoleh hanya sebatas kuantitas atau numerik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kuantitas ini belum memadai dibandingkan dengan kualitas suara dan peran-peran strategis perempuan sebagai pengambil kebijakan di domain politik.<sup>8</sup> Namun dapat diketahui bahwa Kartini telah memperjuangkan kaum perempuan yaitu melakukan suatu strategi pendidikan. Kartini berpandangan bahwa pendidikan dianggap syarat utama untuk membebaskan diri dari segala kekurangan.<sup>9</sup> Demikian pula di (DPRD) Kab/kota, perempuan berusaha untuk

---

<sup>7</sup>Nuni Silvana, Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif, 2013, h. 13. Repository. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto .ac.id. (diakses 12 desember 2018).

<sup>8</sup>Henry Subianto dan Rachmah ida, *komunikasi politik, media dan demokrasi*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.182.

<sup>9</sup>Riant Nugroho, *Gender dan strategi pengarus-utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.89.

memperoleh kursi agar dapat duduk menjadi anggota DPRD Kab/kota dengan tujuan dapat menyampaikan aspirasi perempuan bahwa jumlah keterwakilan perempuan sekarang ini dalam lembaga-lembaga politik yang dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh yang berarti dalam politik.

## **2. Aturan Tentang Kuota 30% Perempuan**

UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:<sup>10</sup>

a. Pasal 2 ayat (2)

Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

b. Pasal 2 ayat (5)

Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

c. Pasal 29 ayat (1a)

Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

---

<sup>10</sup>UU no 2 tahun 2011



## C. Pemilihan Umum Legislatif

### 1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum adalah suatu proses yang diadakan oleh negara Indonesia setiap lima tahun sekali dan rakyatlah sebagai orang yang ikutserta dalam agenda per lima tahun tersebut untuk memilih calon-calon wakil rakyat serta calon Presiden dan calon wakil Presidenya. Pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat tersebut dilaksanakan serentak/bersamaan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Agenda ini dilakukan karena peraturannya sudah tertera di dalam UUD 1945.

Dalam pemilihan umum sering terjadi yang namanya suap menyuap antara si pemilih dan yang akan dipilih namun dalam islam dan hukum yang ada di Indonesia tidak membenarkan adanya hal tersebut Jika seseorang tidak melakukan suap menyuap maka negara akan aman dari para koruptor dikarenakan hal seperti ini yang dapat menghancurkan suatu negara. Menerima dan Memberi dalam hal ini semuanya sama-sama bersalah karena melanggar hukum yang ada di negara.

Mengenal suatu kepatuhan terhadap aturan-aturan dari penegakan hukum terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik antara lain:<sup>11</sup>

1. Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif.
2. Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilihan umum.
3. Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih.
4. Adanya hak bagi pemilih , kandidat, dan Partai Politik untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilihan umum atau lembaga pengadilan.

---

<sup>11</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.171.

5. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara pemilihan umum atau lembaga pengadilan.
6. Adanya hak untuk banding
7. Adanya keputusan yang sesegera mungkin.
8. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan.
9. Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilihan umum terhadap hasilnya.
10. Adanya proses prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Dalam hal ini menjelaskan bahwa warga Negara mempunyai hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk turut serta ambil bagian dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama dan hak untuk dipilih dan memilih.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan yang berada di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara dalam mendapat perlindungan hukum.<sup>13</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Pemilu**

- a). Bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

Menurut penulis tujuan yang pertama pemilu ini untuk mengganti kepemimpinan yang lama ke kepemimpinan yang baru agar tidak pada saat

---

<sup>12</sup>Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), h. 98.

penggantiannya tersebut tidak ada kekacauan yang dilakukan dan jika calon Presiden baru menjabat 1 periode maka calon Presiden masih bisa ikut dalam pemilu selanjutnya dan jika sudah menjabat selama 2 periode maka calon Presiden tersebut tidak lagi bisa menjabat.

b). Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.

Menurut penulis tujuan pemilu yang kedua ini terpacu pada keanggotaan yang ada pada lembaga perwakilan rakyat seperti: DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA. Jika masa jabatan seorang anggota dewan sudah habis maka akan dilakukan pemilu yang bertujuan untuk memilih kembali anggota baru.

c). Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat artinya bahwa pemilu dilakukan guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan memenuhi aturan-aturan yang ada dalam UUD 1945 karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

d). Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara artinya bahwa pemilu di adakan guna bertujuan untuk memenuhi hak semua warganegara baik sebagai orang yang ingin dipilih maupun sebagai orang yang akan memilih serta seluruh manusia yang ada didunia memiliki hak yang sama karena manusia memiliki hak tersebut sejak ia lahir sampai ia mati maka tidak ada perbedaan diantara semua orang.

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mosawwir antara lain:(1) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;

(4) Sarana rekrutment politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.<sup>14</sup>

### **3. Penyelenggara Pemilu**

Komisi pemilihan umum merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum legislatif yang memantau jalannya pemilihan umum legislatif. Seperti juga Badan Pengawasan pemilihan umum yang juga merupakan lembaga yang menyelenggarakan serta mengawasi jalannya pemilihan umum. Keduanya disebut sebagai lembaga yang mendapatkan tugas untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum legislatif yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan wakil Sekretaris Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota adalah PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

### **4. Sistem Pemilihan Umum**

Adapun sistem pemilihan umum, lebih lanjut dapat diuraikan macam-macam sebagai berikut:

#### **1. Sistem pemilihan organis**

Dalam pandangan G.Y. Wolhoff, pada sistem organisme ini rakyat di pandang .<sup>16</sup> Sebagai orang yang hidup secara bersama baik bersama

---

<sup>14</sup>Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 23.

<sup>15</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009) h.20.

<sup>16</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.151-152.

keluarganya maupun kerabatnya yang sering Indonesia katakan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dan sinilah rakyat berperan sebagai pengendali dalam hak untuk memilih.<sup>17</sup>

## 2. Sistem pemilihan mekanis

Dalam pemilihan mekanis menurut penulis sistem ini diartikan bahwa masyarakat merupakan massa atau sekelompok orang yang sama yang memiliki hak yang sama pula serta memiliki satu suara dalam memilih calon anggota DPR RI, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KAB/KOTA.

## 3. Distrik dan system distrik

Distrik merupakan suatu penentuan luas wilayah yang ada dalam suatu negara untuk mengetahui wilayah si pemilih dan system distrik merupakan suatu sistem pemilihan umum yang hanya dalam pemilihan calon-calon legislatif hanya mempunyai 1 peluang diantara banyaknya calon-calon yang lain.

Sistem distrik yang merupakan sistem yang tertua, menunjuk kepada pertarungan antara kandidat yang dicalonkan oleh partai-partai politik dalam sebuah wilayah yang kecil (daerah pemilihan) untuk mencari satu wakil (*single-member constituency*).<sup>18</sup> *single-member constituency* yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil, yang disebut system distrik.<sup>19</sup>

Sebagai contoh untuk memilih seorang wakil dari distrik M yang akan duduk di lembaga perwakilan negara bersangkutan diajukan 5

---

<sup>17</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 152.

<sup>18</sup>Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 111.

<sup>19</sup>Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 45.

(lima) orang calon yaitu A, B, C, D dan E. biasanya tiap partai hanya mencalonkan/mendukung seorang calon. Dalam pemilihan bersangkutan A mendapat 21 suara, B 20 suara, C 20 suara, D juga 20 suara dan E 19 suara. Maka menurut sistem pemilihan ini yang terpilih, menjadi wakil diparlemen adalah A, karena dia memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut, yaitu 21 suar. Betapapun kecilnya selisih suara yang diperolehnya dalam pemilihan tersebut dari calon lainnya tidak menjadi soal. Dan tidak ada perhitungan suara yang tersisa, semua suara B, C, D dan E, dianggap hilang.<sup>20</sup>

#### 4. Sistem pemilihan mayoritas-pluralitas

Dalam sistem ini, untuk dapat terpilih di suatu daerah pemilihan (distrik) seorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus mendapat jumlah suara tertinggi dari suara yang sah atau mayoritas suara dari suara yang sah dalam distrik tersebut.<sup>21</sup> Menurut Paimin Napitupula, karena seseorang dapat terpilih hanya dengan 29% suara, system distrik mendapatkan reputasi yang buruk. Karena itu dicari jalan bagaimana menghilangkan kejelekan sistem distrik namun tanpa menghancurkan ciri-ciri utama sistem distrik. Kompromi yang ideal adalah bagaimana menciptakan suatu sistem pemilihan yang mudah dipahami oleh para pemberi suara, menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kuat, dan setiap anggota parlemen mewakili suatu konstituensi sekaligus mendapatkan dukungan mayoritas dan konstituensinya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.152-153.

<sup>21</sup>Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.131.

<sup>22</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.153.

#### 5. Pemilu dengan sistem representasi proporsional

Dalam satu daerah pemilihan terdapat beberapa wakil, jumlah wakil yang terpilih untuk satu distrik ditentukan oleh persentase suara yang sah yang diraih oleh partai atau kandidat peserta pemilu dalam distrik tersebut.<sup>23</sup> Misalnya, suatu negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan sistem proporsional yang mempunyai 30 kursi di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum. pertama dibagikan dulu 30 kursi tersebut kepada daerah-daerah pemilihan misalnya, 4 daerah pemilihan. Dengan pertimbangan-pertimbangan wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya, maka ditentukan daerah pemilih B-7 kursi, daerah pemilih C-7 kursi dan daerah pemilih D-6 kursi. Kursi daerah pemilihan A yang jumlahnya 10 dibagikan kepada partai/organisasi politik peserta pemilihan umum sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh partai/organisasi politik tersebut, dalam pemilihan yang bersangkutan. Dalam perhitungan nanti yang menentukan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai/organisasi peserta pemilu adalah bilangan pembagi pemilih.

Sisa suara yang mungkin ada di suatu daerah pemilihan tidak lagi dapat dipindahkan ke daerah pemilihan yang lain.<sup>24</sup>

#### 6. Sistem semi-proporsional

Sistem semi-proporsional merupakan sistem yang mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada diantara proporsionalitas sistem

---

<sup>23</sup>Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.133.

<sup>24</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.155.

perwakilan proporsional dan mayoritas dari sistem mayoritas pluralitas. Dalam sistem ini, partai politik yang tidak mendapat dukungan suara yang terbanyak masih dapat memperoleh perwakilan.<sup>25</sup>

#### 7. Bentuk campuran

Bentuk campuran adalah menggabungkan antara pemilu system distrik dalam distrik pemilihan langsung dengan pemilu sistem proporsional yang menggunakan daftar calon. Terlepas dari variasi-variasi yang ada, bagi para pendukungnya sistem campuran dianggap dapat menjadi resep untuk mengobati kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem distrik maupun proporsional. Dengan melaksanakan campuran, persoalan keseimbangan (disproporsionalitas) antara perolehan suara dengan perolehan kursi yang menjadi kelemahan utama dari sistem distrik dapat dikurangi. Pada saat yang sama, kurangnya tanggung jawab dari para anggota parlemen terhadap konstituensinya yang merupakan kelemahan utama dari sistem proporsional juga dapat ditutupi. meskipun demikian, bagi para pengkritiknya, sistem campuran ini juga dianggap mengandung kelemahan yaitu: tidak ada keharusan untuk melakukan pemilihan tambahan (*by election*).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 155-156.

<sup>26</sup>Rahman syamsuddin dan Ismail aris, *merajut hukum di Indonesia*, (Jakarta: mitra wacana media, 2014), h. 156.



## **D. Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD )**

### **1. Pengertian DPRD**

Dewan Perwakilan Daerah adalah Majelis tinggi dalam sistem dua kamar parlemen.<sup>27</sup> Serta DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan dalam wilayah daerah baik itu Provinsi, Kab/kota yang keanggotaanya dipilih melalui pemilihan umum dan diusung oleh salah satu partai politik untuk dijadikan sebagai calon legislatif hingga terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang menjabat selama satu periode yaitu lima tahun.

### **2. Syarat-Syarat Menjadi Anggota DPRD**

#### **a) Bertaqwa pada Tuhan yang maha esa**

Yaitu seseorang yang ingin menjadi wakil rakyat harus memiliki Agama dan keyakinan yang tinggi utamanya beragama Islam artinya bahwa kita percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan segala peritahnya dan menjauhi semua larangannya agar bisa menjadi manusia yang bertaqwa.

#### **b) Warganegara Indonesia sejak lahir**

Bahwa setiap orang yang ingin menjadi wakil rakyat harus berkebangsaan Indonesia mulai dari lahir sampai saat ini maksudnya yaitu wakil rakyat harus asli warganegara Indonesia agar yang menjadi wakil rakyat betul-betul rakyat Indonesia.

---

<sup>27</sup>Jumadi, *penguatan fungsi pengawasan DPD RI dalam sistem bikameral parlemen*.(journal yurisprudentie: volume 6 nomor 1 Juni 2019). h. 109.

c) Tidak pernah mengkhianati negara

Yaitu seorang yang ingin menjadi wakil rakyat tidak boleh mengkhianati negara contohnya: bekerjasama dengan negara lain demi kepentingan sendiri bukan kepentingan negara yang dapat merugikan negara.

d) Mampu secara jasmani maupun rohani

Seorang calon legislatif harus mampu sehat jasmani dan rohani dikarenakan seseorang akan menjabat dan akan melakukan aktivitas yang sangat padat jika sudah menjadi anggota dewan maka dari itu dalam syarat untuk menjadi caleg itu sangatlah penting karena jika seseorang sakit maka akan percuma karena dia tidak akan bisa menjalankan semua tugas yang akan dia emban selama masa jabatannya satu periode yaitu lima tahun.

e) Bertempat tinggal di Indonesia

Artinya adalah jika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat maka dia harus tinggal Indonesia sejak lahir sampai saat ini dan memiliki tempat tinggal di wilayah Indonesia (rumah).

f) Telah melaporkan kekayaannya

Yaitu seorang calon wakil rakyat memberikan laporan kekayaannya hal ini bertujuan agar setelah iya menjabat dapat dengan mudah diketahui bahwa berapa banyak uang yang dihasilkan selama iya menjabat sebagai wakil rakyat apakah pemasukan yang dihasilkan sangatlah banyak atau sesuai dengan gaji yang diberikan negara kepadanya hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi kecurangan terhadap para politisi agar terhindar dari yang namanya korupsi.

- g) Tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

Seorang wakil rakyat tidak boleh dalam keadaan pailit dikarenakan jika dalam keadaan pailit maka jiwa dan raga seseorang akan hancur.

- h) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

Bahwa seorang calon wakil rakyat tidak boleh melakukan perbuatan tercela dikarenakan dapat mencoreng namanya sendiri dan membuatnya sulit untuk diberikan kepercayaan dari masyarakat maka dari itu syarat ini diberikan

- i) Terdaftar sebagai pemilih

Seorang yang ingin menjadi wakil rakyat harus terdaftar di catatan sipil Kab/kota masing-masing dan tidak boleh terdaftar pada 2 Kab/kota harus terdaftar pada satu kota saja Karena setiap masyarakat memiliki satu hak pilih atau satu suara dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah setempat dll. Karena jika tidak terdaftar sebagai pemilih berarti belum cukup umur atau memang bukan warganegara Indonesia.

- j) Memiliki NPWP dan telah membayar pajak selama lima tahun terakhir  
Syarat ini diberikan karena dari syarat inilah kita akan ketahui bahwa seorang calon wakil rakyat betul-betul warganegara yang baik yang patuh pada aturan karena membayar pajak maka dari berarti calon wakil rakyat tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.

- k) Setia pada Pancasila dan UUD 1945

Bahwa setia pada Pancasila dan UUD 1945 memang harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia siapapun itu baik rakyat ataupun wakil rakyat, baik orang kaya ataupun orang miskin, baik pejabat ataupun rakyat jelata semuanya harus setia karena jantung Indonesia berada pada

Pancasila dan UUD 1945 jika jantung tersebut diabaikan maka kehancuran pada negara akan terjadi.

l) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara

Seorang calon wakil rakyat bukanlah narapidana artinya seorang harus bersih terhadap hukum karena seseorang yang belum pernah dijatuhi pidana penjara bisa saja melakukannya dan sebaliknya apalagi yang sudah pernah dijatuhi pidana penjara lebih berpeluang melakukan perbuatan itu lagi yang dapat dikenakan sanksi dan dipenjara.

m) Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun

Bahwa calon wakil rakyat harus memiliki usia sekurang-kurangnya 21 tahun karena untuk menjadi seorang calon wakil rakyat harus dewasa bukan anak-anak ataupun seorang remaja dan jika seorang caleg adalah anak-anak dan remaja maka setiap keputusannya tidak akan dipikirkan secara matang dan masih berpikir kekanak-kanakan.

n) Berpendidikan paling rendah SMA, SMK, MA DAN MAK

Calon wakil rakyat minimal berpendidikan sekolah menengah ke atas dan seterusnya karena makin tinggi suatu pendidikan seseorang maka semakin banyak pula pengetahuannya serta semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin rendah pula pengetahuan seseorang.

o) Bukan bekas anggota terlarang seperti PKI

Seorang caleg harus diketahui asal usulnya serta paling utama tidak pernah menjadi anggota partai komunis Indonesia karena faktanya PKI sejak dahulu merupakan musuh bagi negara Indonesia karena PKI merupakan salah satu kelompok yang memberontak contohnya pada G30SPKI.

p) Memiliki visi dan misi.

Bahwa jika ingin menjadi caleg maka seseorang harus memiliki visi dan misi karena dari visi dan misi inilah seorang wakil rakyat dapat diketahui kepribadiannya karena disanalah pemikiran-pemikiran para wakil rakyat dalam mengembangkan negara dituangkan dalam kata perkata dan kalimat per kalimat untuk membuktikan kemampuannya dalam menarik perhatian besar rakyat Indonesia.

### **3. Hak Anggota DPRD Kab/Kota**

Anggota DPRD memiliki Hak yaitu:

Hak Interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah, mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.<sup>28</sup> Serta dapat juga diartikan sebagai suatu hak yang diberikan kepada anggota DPRD Kab/Kota untuk mengetahui kebijakan-kebijakan para Bupati dan ataupun Walikota demi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Hak Angket merupakan suatu hak yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam melakukan penyelidikan sendiri guna menghindari adanya dampak buruk tentang penentangan terhadap UUD 1945.

Hak menyatakan pendapat merupakan hak bagi para anggota DPRD Kab/kota untuk memberikan pendapat dan usulannya dalam sidang yang dilakukan dikantornya.

Hak bertanya merupakan hak anggota DPRD Kab/kota dalam menyampaikan pertanyaannya apakah dalam sidang masih ada penjelasan

---

<sup>28</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), h. 98.

yang belum dimengerti pertanyaan ini ada dua kategori yaitu bertanya secara tulisan contohnya: dalam sebuah surat dan secara lisan contohnya: yaitu anggota DPRD langsung bertanya dengan cara tatap muka *face to face*.

Diatas merupakan empat hak bagi anggota DPRD Kab/kota maka dari itu hak diatas dapat diketahui bahwa hak DPR RI, maupun hak DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota kurang lebih memiliki kesamaan hanya saja penerapan atau luas wilayah yang ditanganinya berbeda. Anggota legislatif tersebut sama-sama dipilih oleh rakyat sehingga para anggota legislatif tersebut saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan lokasi penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan salah satu metode penelitian yang memerlukan pengetahuan dalam akan berbagai macam literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti dikarenakan penelitian ini langsung terjun kelapangan jika ingin meneliti dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

##### **2. Lokasi penelitian**

Sesuai dengan judul dan jenis penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian langsung dilapangan maka lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian yaitu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. Karena dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kab. Takalar jumlah keterwakilan perempuan sangatlah minim.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan sosial yang timbul di dalam masyarakat.
2. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu hal dari aspek hukumnya ataupun peraturan perundang-undangan.

### C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>1</sup>

2. Data skunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>2</sup>

### D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode nyata untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan penelitian yang dilakukan kepada seorang narasumber tentang hal-hal yang berkenaan dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini pihak yang berada dalam lingkup DPRD Kab. Takalar.

Adapun data tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar diperoleh dari data melalui wawancara dengan anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar dan Tokoh masyarakat Desa di Kab. Takalar. Yaitu anggota perempuan DPRD Kab. Takalar berjumlah 3

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi,( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.31.

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.31.



orang yaitu: Husniah Rachman Dg. Tayu, Hj. Erni Alerah, Nur Annisa Said dan 3 orang Tokoh masyarakat yaitu: Benati, Rosniah, Rosmini.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data dalam bentuk dokume-dokumen yang didalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan serta Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data-data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen atau bahan tertulis seperti buku, catatan-catatan dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan serta relevan dengan pembahasan penelitian.

## 3. Observasi

Observasi merupakan pencatatan yang dilakukan lewat pengamatan peneliti terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Observasi juga bisa diartikan sebagai pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian terlebih dahulu yang menjadi objek penelitian, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang diteliti dan jenis data yang diperoleh, maka penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:<sup>3</sup>

*Tahap pertama*, meneliti bahwa jumlah keterwakilan perempuan di perpolitikan apakah sudah mencukupi kouta 30% atau tidak.

*Tahap kedua*, menetapkan beberapa orang anggota DPRD Kab. Takalar yaitu Ir. Husniah rachman Dg. Tayu, Hj. Erni Halerah dan Nur Annisa Said, S.H.

---

<sup>3</sup>Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan Studi Pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan, h. 135. Repositori.uin-Alauddin.ac.id (Diakses 16 Juni 2020).

*Tahap ketiga*, memilih dan menetapkan salah satu tokoh masyarakat, Agama dan salah satu masyarakat Takalar untuk memperbandingkan jawaban dari para Anggota DPRD Kab. Takalar.

*Tahap keempat*, melakukan wawancara pada setiap Narasumber.

*Tahap kelima*, mengambil kesimpulan hukum.<sup>4</sup>

## **E. Instrumen penelitian**

Instrumen Penelitian yaitu menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.<sup>5</sup>Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, kusioner dan observasi guna memperoleh data dari sumber-sumber informasi.

## **F. Teknik pengolahan data dan analisis data**

### **1) Teknik Pengolahan**

Teknik pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data dari hasil penelitian yang dilakukan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data baik yang diperoleh dilapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan lalu diklasifikasikan dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

---

<sup>4</sup> Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan Studi Pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan, h. 135. Repositori.uin-Alauddin.ac.id (Diakses 16 Juni 2020).

<sup>5</sup>Muldjono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian* ( Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.

## 2) Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara terstruktur data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, kusioner, dan observasi untuk menghindari banyaknya kesalahan dalam melakukan penelitian dan memperoleh kemudahan pemahaman.



## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian***

##### **1. Geografis**

Kabupaten Takalar merupakan salah satu dari 24 Kab/Kota dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa. Ibu kota Kab. Takalar terletak di Pattallassang. Kab. Takalar terdiri dari Sembilan Kecamatan, yaitu: Pattallassang, Polombangkeng Utara, Polombangkeng Selatan, Galesong Selatan, Galesong, Galesong Utara, Manggarabombang, Mappakasunggu, dan Sanrobone. <sup>1</sup>

Secara geografis Kabupaten Takalar terletak antara 5P<sup>0</sup>P3' sampai 5P<sup>0</sup>P38' Lintang Selatan dan antara 199P<sup>0</sup>P22' Sampai 199P<sup>0</sup>P39' Bujur Timur. Disebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan laut Flores. yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%) perkebunan Tebu PT.XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%) tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%). Pekarangan seluas 1.929,90 Ha (3,41%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), dan lain-lainnya seluas 7.892,22 Ha (13,93%).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><http://id.m.wikipedia.org>

<sup>2</sup><http://id.m.wikipedia.org>

Berdasarkan letak geografis, kondisi sosio-kultur, potensi alam dan infrastrukturnya, Kabupaten Takalar dapat dipetakan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- Kawasan Pesisir Pantai, meliputi: Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan Mangarabombang, merupakan daerah pantai dan memiliki lahan yang relatif subur. Potensi kawasan ini merupakan potensi untuk dikembangkan (menonjol) kawasan budidaya perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Wilayah ini memiliki potensi Rumput Laut yang menjanjikan untuk diekspor. Selain itu, terdapat potensi pertambangan berupa potensi pasir besi serta industri briket batubara. Selanjutnya kawasan ini juga memiliki potensi parawisata baik wisata alam seperti pantai Punaga, pantai Pokko, pantai Parappa, pantai Lamangkia, kawasan pulau Tanakeke, maupun wisata budaya seperti Maudu Lompoa, pesta Nelayan, pesta Adat Gaukang Karaeng Galesong dan Benteng Sanrobone.
- Kawasan dataran rendah dan perbukitan, meliputi Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kecamatan Pattallassang merupakan ibukota Kabupaten Takalar sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perekonomian, perkantoran dan pendidikan. Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan sebagai wilayah pertanian yang cukup subur. Keberadaan bendungan Kampilibissua, Jenemarrung, Jenetallasa, Jenemaeja dan Pammukkulu perlu diupayakan peningkatan fungsinya dalam menunjang sistem irigasi.

---

<sup>3</sup><http://id.m.wikipedia.org>

Disamping itu, keberadaan Pabrik Gula Takalar juga perlu dimaksimalkan perannya dalam membantu masyarakat memperoleh pendapatan yang layak. Potensi wisata alam yang terdapat di Desa Barugaya juga harus dikelola dengan baik agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kawasan ini juga memiliki potensi wisata budaya yang telah berlangsung secara rutin setiap tahun, yakni pesta panen dengan tradisi A'lamang (Lemang) dan A'dodoro (Dodol).

Secara Tipologi, wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Berdasarkan topografinya, Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m. Secara geologi, terdiri dari batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan *alluvial*, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan basal.<sup>4</sup>

Secara Topografis, Kondisi topografis Kabupaten Takalar yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan dan pesisir pantai, selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana khususnya banjir dan angin topan. Kawasan rawan bencana tersebut antara lain:<sup>5</sup>

- Daerah rawan banjir berada di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Mappakasunggu.
- Daerah rawan angin topan berada di kawasan pesisir pantai meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Selatan.

---

<sup>4</sup><http://id.m.wikipedia.org>

<sup>5</sup><http://id.m.wikipedia.org>

## 2. Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Takalar secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Pattallassang, Polombangkeng utara, Polombangkeng selatan, Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang, Galesong, Galesong selatan, Galesong utara.<sup>6</sup>

Tabel 1

Bupati dan wakil Bupati di Kab. Takalar

No	Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Wakil Bupati
1	Donggeng Dg. Ngasa	1960	1964	-
2	Makkatang Dg. Sibali	1964	1967	-
3	M. Suaib Pasang	1967	1978	-
4	Ibrahim Tulle	1978	1983	-
5	Batong Aminullah	1983	1987	-
6	Drs. H.Tadjuddin Nur	1987	1992	-
7	Drs.H.Syahrul Saharuddin M.S.	1992	1997	-
8	Drs. H.Zainal Abidin	1997	2002	Drs. H.M.Said Pammusu M.Si.
9	Drs. H.Ibrahim Rewa, M.M.	2002	2012	Drs.A.Makmur.A . Sadda M.M.
10	Dr.H.Burhanuddin Baharuddin S.E., M.Si.	2012	2017	H. M. Natsir Ibrahim M.M.
-	Ir.Andi Darmawan Bintang M.Dev.PLG	2016	2017	-
-	H. M. Natsir Ibrahim M.M	2017	2017	-
11	H. Syamsari Kitta S.Pt,MM	2017	Petahana	H.Ahmad Dg.Se're S.Sos

**Sumber:** : <http://pemerintahan.Kab. Takalar> (diakses 14 Desember 2019).

<sup>6</sup><http://id.m.wikipedia.org>

**Keterangan :** Tanda (-) artinya bahwa 1. Pelaksanaan tugas (plt) Bupati, menggantikan Bupati Burhanuddin yang sedang cuti dan yang 2. Pelaksanaan Tugas (plt) Bupati, menggantikan Bupati Burhanuddin yang nonaktif.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Takalar berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2014 sebanyak 5.926 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2

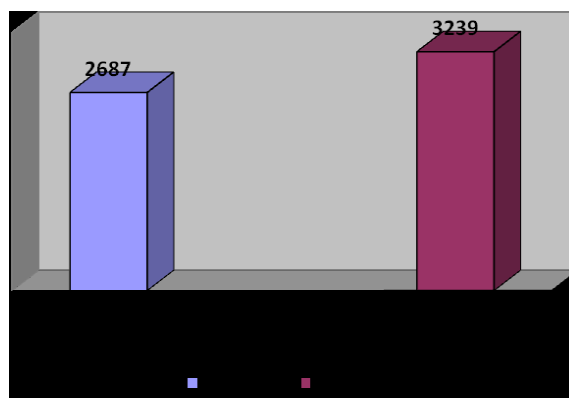
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.687
2	Perempuan	3.239
	Total	5.926

Sumber: <http://BKPPD.Kab. Takalar> (diakses 14 Desember 2019)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa PNS didominasi oleh perempuan sebanyak 3.239 orang atau 54,65% sedangkan laki-laki sebanyak 2.687 orang atau 45,35% dari total PNS yang ada. Adapun perbandingan Nampak jelas pada Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1.





## Jumlah PNS Laki-Laki dan Perempuan

Keterangan:

- warna biru: laki-laki
- Warna ungu: perempuan

### 3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Takalar setiap tahun mengalami peningkatan dapat dilihat mulai dari jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai dengan jumlah penduduk tahun 2018.

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar

No	Kecamatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Manggarabombang	38.381	38.653	38.913	39.156
2	Mappakasunggu	15.887	16.010	16.129	16.239
3	Sanrobone	13.865	13.959	14.048	14.130
4	Polombangkeng selatan	28.070	28.287	28.494	28.690
5	Pattalassang	37.809	38.394	38.975	39.551
6	Polombangkeng utara	48.766	49.288	49.797	50.290
7	Galesong selatan	25.395	25.668	25.936	26.194
8	Galesong	40.012	40.491	40.962	41.421
9	Galesong utara	38.721	39.228	39.729	40.221
Total		286.906	289.978	292.293	295.892

Sumber : <http://BPS.Takalar.Kab.go.id>(diakses 14 Desember 2019).

### B. KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KAB. TAKALAR.

Berdasarkan Pemilihan Umum yang telah dilakukan pada Tahun 2019 diketahui bahwa Di Kabupaten Takalar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yaitu Berjumlah 30 orang dan diantara 30 orang tersebut jumlah keterwakilan perempuan dalam ranah DPRD yaitu 8 orang. Namun dalam periode-periode sebelumnya tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di DPRD Kab. Takalar itu sudah mulai mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari dari jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah pemilih laki-laki serta adanya kesadaran perempuan untuk memilih sesama perempuan.

Dalam hal keterwakilan perempuan di Kab.Takalar setiap partai yang ada di Kab.Takalar harus memiliki seorang anggota legislatif perempuan serta mengikuti pola-pola rekrutment yang telah ditetapkan oleh setiap partai diantaranya:

**1). Berikut daftar calon legislatif (caleg) dari partai politik yang ada di Kab. Takalar:**

a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Tabel 4.

Daftar Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallasang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	H. Abdul Haris, Se	Drs Syamsuddin Nur	H.Bahtiar Syam,Se
2	Makmur	Basri	Sudirman
3	Rosdiana	Jumriani, S.Pdi	Suaebah
4	Hamka T Naba,S.H.I	Andi Muhammad Kosasi	Muh.Arief Hamzah
5	Hj.St.Rohani,Amd.Pd	Kasmawati	Amiluddin

6	St Nurhayati M	Bungaduri Dg Bau	Lilis Irmayanti
7	H.Mustafa Dg.Nyarrang,S.Sos	Nai Laidi	Muhammad Syahrir
8	Syamsuddin Dg Sibali		Ilham
9	Hasniah Nurung		Sitti Hamsinah
10	Abd Rahman		Kasrianti
11	Andi Muhammad Nur		H.Muhammad Dahlan
12	Rosmiati		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 4 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya disebut PKB berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 2 orang yaitu H. Abdul Haris, S.E dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), dan H. Bahtiar Syam,S.E dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

b. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Tabel 5

Daftar Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Manggarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	H. Burhan Talli,Se	Ir.H. Indar Jaya M.Si	Drs.H.Ahmad Dg Sija
2	Muh.Aswin Madjid	Abdullah Pasang	H. Gazali Dg Ngewa
3	Hj.Sitti Hasmiaty	Sri Handayani, Se	Hj. Aidah Dg Labbi
4	H.Basri Timung,S.E	Hartawan, Se	Muh. Khaerul Qadri, S.Sos
5	Hamsar	Mirawati	Hj.Sry Widyastuti
6	Musdalipah	Wahira	H.Nasrun Salle, S.Ip
7	Muliaty	Jaya Irianto, S.Sos	Syamsiar
8	Alwi Se,M.Kes		Drs M Ali Husain
9	Nasrun Natsir		Nur Iftitah
10	Novi Pramesti Krisnawati		Abdul Rahman
11	Kamaruddin, Se		Muhammad Rais.A
12	Kusbin Ali		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 5 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki

dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 3 orang yaitu MUH. ASWIN MADJID dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), dan Ir.H. INDAR JAYA M.Si dari Dapil II (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang) DRS.H.AHMAD DG SIJA dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Tabel 6

Daftar Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Ir.H.A.NOOR ZAE LAN	SYAMSUDDIN	ARDYANSYAH PUTRA S.,S.Pd
2	Drs.H.Muh. Dahlan	Muh. Faizal	Hj.Kasmawati
3	Yasseng	Hj.Wahyuna Malik	H.Amiruddin Mami., Se
4	Drs.H.Bakri Bangsa Dg Taba	Mukhlis	M.Syahrir M., S.Ip
5	Drs. Mappaita Awe	Hasri Haris	H.Kaharuddin Rukka
6	Suwartina	Rahma Hidayatullah	Mardianti
7	Aris Rahim	Elly Maryati	H.Muhammad Sain Dg. Boko
8	Achmad Afandi		Syamsuddin
9	Putri		Sartika

10	Muh. Tahir		Sitti Maemunah, S.Sos
11	Dina		Muhammad Kadir, S.Sos
12	Irwansyah, S.Kep. Ns		

sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 6 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjumlah 2 orang yaitu Ir.H.A.Noor Zaelan dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), dan H.Amiruddin Mami., S.E dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

d. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Tabel 7

Daftar Caleg Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	H.M. Jabir Bonto	Drs H. Muchtar Maluddin, Mm	Pahlawang Maulana
2	H.A.Anugrah, Skm	Hj. Sitti Wahidah, S.Sos	Hj.Hasniah Sindawa, Se
3	Fia Fauzia Burhanuddin	Hj. Megawati	Muh. Darwis

4	Suarni	Abd.Kadir M, S.Ag	Anwar
5	Indrawati Muhammaddaud, S.Pt	Anggryana, S.Ap	Irwan Arif,A.Ma
6	H.Muhiddin Mursali, S.Sos	Rini S	Hj. Sunniati,B.Sc
7	Ahmad	Ir.Sukwan Kuddus, Mp	Dedy Janwar Syamsul, S.Ip
8	Dra.Hj.Sahriany Yusuf		Ramlah
9	Amiruddin		Wahyu Eka Putra
10	H.Bakri Lalang, S.Pd		Muhammad Ridwan
11	Rariyanti Wijaya		Harlinah
12	Dedy Wahyudi Hasta, S.Ip		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 7 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Golongan Karya (GOLKAR) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 3 orang laki-laki dan 4 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) berjumlah 4 orang yaitu H.M. JABIR BONTO dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), dan Drs H. Muchtar Maluddin, M.M dari Dapil II (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang) Pahlawang Maulana serta Wahyu Eka Putra dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

e. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Tabel 8

Daftar Caleg Partai Nasional Demokrat (NASDEM) di Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Saiyed Muhajirin	H Kasman Dg Ngasa	Indar
2	Drs.H.A.Makmur As,Mm	Yasim M.Said,Se	Ir.Hj. Darmawati
3	Hamdana, S.Pd	Saripa Irwana	Dra.Fatma Irwani Dg Tarring
4	Muh. Yusuf Karma, Se	Hartiah Dg Bau	Muhammad Ali
5	Marsulyati Sibali, Se	Indra Jaya Indar, S.M	Akbar Danu Indarta
6	Syarifuddin, Se	Nining Rukmini Dg Kanang, Se	Fitrianti, Se
7	Ainuddin Akbar, S.E	Andi.Edwin Parawangsyah, Sh	Muh. Nur Salam, Se
8	M.Yamin Daeng Kawang		Iskandar
9	Sri Jayanti		Sattuag
10	H.Syahrudin T Dg Lalle		Narmawati
11	Suciana		H.Muh.Nasir Dg Gajang
12	M.Fadel Achmad		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 8 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I Sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang celeg yaitu 4 orang laki-laki



dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 3 orang yaitu M. Fadel Achmad dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), dan Andi Edwin Parawangsyah, S.H dari Dapil II (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang) Ir.Hj. Darmawati dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

f. Partai GARUDA

Tabel 9

Daftar Caleg Partai GARUDA di Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Drs H.Abd Djalal Dg. Ngalle, M.Si	Ahmad Mannanggongi Abdullah Dg.Ngampa	Hasrullah Qurnianto Maddatuang Dg.Lallo,St
2	Ir.Nasrullah Rahim Dg Nuru	Amir.M	Muh Tahir Dg.Sese
3	Aminah	Indriana Kamaruddin	Husnuz Santi Nur
4	Basri Dg.Mangka, S.Sos	Farida	
5	M Husni Guna		
6	Ananda Andy Legenda		
7	Juniati		
8	Muliady Dg. Leko		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 9 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai GARUDA berjumlah 15 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 8 orang caleg yaitu 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 3 orang caleg yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dari semua calon legislatifnya satupun tak terpilih untuk mewakili partainya di kursi DPRD Kab. Takalar.

g. Partai BERKARYA

Tabel 10

Daftar Caleg Partai BERKARYA Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Mirwan	Hj Rosdiana Nanro	H Muhammad Yusuf Se
2	Muhammad Ishak	Bustam Dg Narang	Syihabuddin R
3	Sitti Salmah	Andi Sophia	Nurbaya
4	Muh Iqbal Yustika Ruslan S.Kep	Jamaluddin Sibali	Bangsawan Tika
5	Andri Atmajaya Yasin	Arlianti, Se	Abd Gaffar
6	Hj Ratnawati Herman	Yunus	Ika Astika
7	H Agus	Karniwati	Muh Takdir Dg Pabe
8	M Qadar Makkarang, Ba		Syarif Hidayatullah
9	Nuni Wahyuni		Hj Susilawati
10	Abd Rahman		Abdul Rakhman

11	Maggarisi Saiyye Dg. Nyau		Dian Fitria Arsyad
12	Hj Mardiana Bangsawan, Se		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 10 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai BERKARYA berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 3 orang laki-laki dan 4 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dari semua calon legislatifnya satupun tak terpilih untuk mewakili partainya di kursi DPRD Kab. Takalar.

#### h. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tabel 11

#### Daftar Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattalassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Manggarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Ir.Muh.Darwis Sijaya	Zainuddin, S..P. Dg Moke	Muh.Aksin Suarso Dg Tombong
2	Tajuddin Nur Dg Sitaba	Ahmad Jais	Abdul Asis, S.H Dg Bali
3	Hj.Mardiana Dg Tanning	Ferawati Dani,A.Md	Nur Annisa Said,S.H.
4	Muh.Nur Fithri D.Dg.Siama	Sulaeman Rate, S.E. Dg Laja	H.Mustafa Dg Maro

5	Jufri Dg Siajang	Candra Budiarti, S.E	Amrullah Iskandar, S.E.
6	Melinda Meypayana	Nursia	Ira Angraeni,S.K.M.
7	H.Alamsyah Milee, S.I.P.,M.Si.	Indra Pratama Yasin	Usman D
8	Hj.Haryani		Sabaruddin Dg Sarring
9	Badaruddin Dg Tobo		Hasrianty, S.H.I.,S.Pd.I.
10	Nurhaedah, S.Pd		Nurinsani, A.Md.Kg
11	Sudirman Bl Dg Naba		Hairil Anwar
12	M.Supriadi Syam, S.Sos		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 11 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 5 orang yaitu Ir. Muh.Darwis Sijaya serta Melinda Meypayana dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), Ahmad Jais dari Dapil II (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang) dan Nur Annisa Said,S.H. serta Hairil Anwar dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

i. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

Tabel 12

Daftar Caleg Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Bernadi Zakaria	Syamsi Hindi	Kamba,Se Mme
2	Bahtiar. B	Hamzah Nur	Kaharuddin,S.E
3	Kasmawati	Surianah	Hj. Mariana Hr, M.Pd
4	Sukawaty. S	Heri Prowanto	Nur Hijrah Maudinah
5	Abd. Rahman	Asriani Azis	Israndi Djihad,S.Sos
6	Azis	Sahabuddin, S.E	Rahman
7	Rosnani	Evi Arfitasari	Hamsinah Dg Senga
8	Syahrir Dg Nassa		Nurdin Bandi
9	Muhammad Faizal		H.Abdul Halik
10	Nur Muslih Awaluddin		Aminah
11	St. Rachmawati		H.Abd Rajab, S.Pd
12	Syamsul Bahri		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 12 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang celeg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki

dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) berjumlah 1 orang yaitu Syahrir Dg Nassa dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan).

j. Persatuan Pembangunan (PPP)

Tabel 13

Daftar Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Makmur Mustakim,Sh	Hj, Dawati,Se	H.Nurdin Hs
2	Hairul	Andi Rio Fatwa Dewanda	Kaharuddin S.Pd
3	Islamia Dg. Mammeng	Sitti Aizah Ahmad	Erni Hammado
4	Johasan, S.Pdi	Anwar	Kaharuddin S.Pdi
5	Fachrinawati	H.Mukhtar Dg.Tutu	Muhammad Natsrun
6	Siti Nur Islamiyah	Muslihati L S.Pdi	Nurhayati R
7	M.Fahri Parawansa	Muh.Arfit Abdullah	Asriadi
8	Juparman		Tarring Se
9	Muhammad Nur		Muh. Syamsul Hamka
10	Suriyati Dg.Bale		Sumarni Dg.Mammeng
11	Aspar Dg Liwang		Hj.Fatmawati Samang
12	Hj. Nurnia Dg.Ngai		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 13 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 2 orang yaitu Hj, Dawati,S.E dari Dapil II (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang) H.Nurdin Hs dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

k. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Tabel 14

Daftar Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Justri	Rahmawati, Amd.Keb	
2	Hasmar, Se	Amri, S.Pi	
3	St. Misna Asfianty	Hendra Ali	
4	Mirnawati	Islahuddin Dini.T	
5	Mustafa Karim, Sm	Syahrini Sarmin	
6	Muh Rusli Bella	Safaruddin Bakhtiar	
7	Rahma	Nurwahidah	
8	Didi Muslim Sekutu		

9	Muhammad Ali		
10	Yulianti Suddin		
11	Rusdi		
12	Arifuddin, S.Sos		

Sumber: KPU Kabupaten Takalar Tahun 2019

Dari tabel 14 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 19 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 0 orang caleg. Dari semua calon legislatifnya satupun tak terpilih untuk mewakili partainya di kursi DPRD Kab. Takalar.

#### 1. Partai Amanat Nasional (PAN)

Tabel 15

#### Daftar Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Manggarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Andi Maksim Akib,Sh,Mh	Andi Altin Muis, S.Pt	Ir.Sukiman Azis Dg.Liong
2	M.Ramli Dg.Tompo,S.Pd.I	Muhammad Ridwan Dg.Tawang	Hasan Lewa
3	Hj.Zaenab Dg.Tarring	Nurazysyamz Rani	Hj.Erni
4	Drs.H.Syarifuddin Dg.Ruppa	Abd.Haris Dg.Tompo	Abd.Rahman Dg.Ngola
5	Endang Susilowati	Putri Maepa Wulandari Marwan	Hj.Hadrah Taiyeb, S.Pt



6	Drs.H.Muhammad Dg.Lalang	Ida Nasria	Drs.H.Muh.Ridwan Dg.Nompo
7	Fitryawanti Hakasari	Rahmat Rawatib, S.Pd	Rusnita, A.Md, Keb
8	Baihaqi Zakaria		Abd.Rahman Koro
9	Abd.Rahim Sultan,S.Sos		Muliati Dg.Lino
10	St.Hamsinah Hamid, S.Pd.I		Rian Hidayat
11	Bakri Dg.Sewang		Muhammad Rusli Dg.Ngopo
12	Pahriady Dg.Nai		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 15 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 3 orang yaitu Bakri Dg.Sewang dari Dapil I (Pattallassang, Polongbengkeng Utara, Polombangkeng Selatan), dan Nurazysyamz Rani dari Dapil II (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang) Hj.Erni dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

m. Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

Tabel 16

Daftar Caleg Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Abrianti Nasir,A.Md	Zainuddin Dg.Lawa	Ilham Jaya Torada, Sh
2	Nurdin Tula, S.Sos., M.Si	H.Bahar Dg.Bani	Marhabang
3	Kamaruddin, St.	Anita Sapri	Hadijah
4	Muhammad Ali	Azis, S.Pd	M.Syahur Dg.Ngunjung
5	Iin Pramukasari	Susi Susanti	Nur Indah Yanti
6	Abdul Rahman	Misra	Khaimuddin, S.
7	Kamaruddin Dg. Tola	Ismail Tato, S.Ag	Ratna Astarita Mallarangan
8	Rey Restu Setiawan		Karsono
9	Indah Dwi Ramadhani Darwis		Hasrul Haris
10	Ahmad Asis		Abdul Jabbar
11	Sahawiyah		St.Qamariah Rachman
12	Muhammad Riswan		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 16 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA) berjumlah 2 orang yaitu Abrianti Nasir,A.Md dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), H.Bahar Dg.Bani dari Dapil II (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang).

n. Partai DEMOKRAT

Tabel 17

Daftar Caleg Partai DEMOKRAT Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Ir.Husniah Rachman Dg.Tayu	Ir.Hasbullah Dg.Bali	M.Dahlan Dg.Beta
2	H.Sutami Dg.Tarang, S.Pd	Iis Manherawaty Ikrar	Abd.Kadir Ronrong
3	Ardiansyah Dg.Tunru	Kaharuddin Dg.Kulle	Hj.Ratna
4	H.Dahlan Dg.Gau, S.Sos	Sitti Sahalima S.Pi	Hidayat
5	Muhammad Amir Dg.Nyonri	Rahman Dg.Lewa	Asriani Dg.Lele
6	Krisma Sri Rahayu K, Sh	Nurmawati Dg.Calla	Dahlia Kanang

7	Sahrul Salam Dg.Tau, S.A.B		Amriani Dg.Tabau
8	Siti Halijah. T		Sabaruddin M
9	H.Amril, Sh		Muh.Ridwan Idrus Dg.Nanring, Sh
10	Haerati Dg.Senga		Muh.Dahlan S Dg.Tutu
11	Syaifullah Dg. Ngago		
12	Arianto Dg.Tiro		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 17 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai DEMOKRAT berjumlah 28 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 6 orang caleg yaitu 3 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 10 orang caleg yaitu 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai DEMOKRAT berjumlah 1 orang yaitu Ir.Husniah Rachman Dg.Tayu dari Dapil I (Pattalassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan).

o. Partai Bulan Bintang (PBB)

Tabel 18

Daftar Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Manggarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Johan Dg.Nojeng	Moh.Idris T.Caddy	Ayyub Syuja Syafiq
2	Kasturi Dg.Kuntu	Hj.Hamdana Dg.Tayu	Maryati, Sp
3	Drs.Abd Majid S	Dr.Ir.H.Muhammad Jafar Aidid, Mt	H.Ibrahim Dg.Lotteng
4	M.Haspan Naja	Sakinah Dg.Ngai	Tri Sakti Johan
5	Muhammad Ansyar. R.Dg.Sewang	Ratih Listiana Johan	Johansa Dg.Majja, Sh
6	Uun Ulfa Pratiwi S.Pd	Asmar	Hj.Nursiah Wahab
7	Nursyamsu Dg.Situju	Muhtar Sh,Mh.	Muhammad Nur Alam
8	Hasrul		Hj.Mawar Dg.Sangnging
9	Ardiana		Darwis Dg.Ago
10	Awwar Kahfi Kawang		
11	Raifal		
12	Hj.Suhaeni Hayat, Se		

Sumber: KPUD kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 18 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 28 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 9 orang caleg yaitu 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan jumlah caleg terpilih dari Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 2 orang yaitu Johan Dg.Nojong dari Dapil I (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), H.Ibrahim Dg.Lotteng dari Dapil III (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara).

p. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Tabel 19

Daftar Caleg Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar

NO	Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan)	Dapil Takalar 2 ( Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang)	Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara)
1	Muhammad Arsyad, Sh	Syamsurizal Arifin, Se	H.Adam Hamzah, Dg.Mangka
2	Ir.H.Muhammad Idris Leo, Msp.Iap	Drs.Syarifuddin Sija	Hj.Muliani Dg.Baji
3	Indah Ghadiasty	Hj.Patimasang	Irwan
4	Haeruddin, Se, Dg.Lewa	Muh. Ibrahim Bakri	Sitti Hamsinah
5	H.M. Ayub Ibrahim, Se	Erniati	H.Sabaruyddin, S.Pd
6	Rusliah	Normianti	Muhammad Ikram.Ar
7	Indra Hanafi, Se	Sukardi A. Mh, Dg.Ngewa	Muh. Reza

8	Yayuk Dianasari		Ratu Arikha, S.Pt
9	Rusli		Hikmawati Nur
10	Pelita, S.Pdi		Nurintan Amaliah
11	Harianto		Rustam Dg.Ngasa
12	Arifuddin Joa		

Sumber: KPUD Kabupaten Takalar tahun 2019

Dari tabel 18 dapat dijelaskan bahwa jumlah caleg Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) berjumlah 30 orang yang di bagi menjadi tiga dapil dengan rincian jumlah caleg dari dapil I sebanyak 12 orang caleg yaitu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dari dapil II sebanyak 7 orang caleg yaitu 4 orang laki-laki dan 3 perempuan, dari dapil dan III sebanyak 11 orang caleg yaitu 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dari semua calon legislatifnya satupun tak terpilih untuk mewakili partainya di kursi DPRD Kab. Takalar.

Dari tabel-tabel yang ada diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktanya semua partai politik mulai dari Dapil Takalar 1 (Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Polombangkeng Selatan), Dapil Takalar 2 (Sanrobone, Mappakasunggu, Mangngarabombang) dan Dapil Takalar 3 (Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara) bahwa keterwakilan perempuan di setiap dapilnya terpenuhi yaitu 30% keterwakilan perempuan. Berarti semua partai politik yang ada di Kab. Takalar telah memenuhi kuota 30% dan mengikuti aturan yang sudah ada. Namun berbeda dengan keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD di Kab. Takalar. Serta dari semua partai yang berjumlah 16 partai tersebut diketahui bahwa ada 4 partai yang sama sekali tidak mendapatkan kursi di DPRD Kab. Takalar yaitu Partai GARUDA, Partai BERKARYA, Partai PSI, dan Partai PKPI .

**2). Daftar persentase calon anggota legislatif dan anggota legislatif Kab. Takalar.**

Tabel. 20

Persentase jumlah calon anggota legislatif dan jumlah anggota legislatif di Kab.

Takalar.

No	Laki-laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1	Calon Legislatif	62,7%	Calon Legislatif	37,3%
2	Anggota legislatif	73,3%	Anggota legislatif	26,7%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar tahun 2019 dari calon anggota legislatif secara keseluruhan yaitu berjumlah 450 orang dan jumlah calon anggota laki-laki yaitu 282 orang sehingga jika dipersentasekan memiliki persentase 62,7% dan jumlah calon anggota perempuan yaitu berjumlah 168 orang jika dipersentasekan memiliki persentase 37,3%. Serta jumlah anggota legislatif di Kab. Takalar berjumlah 30 orang dan jumlah anggota laki-laki yaitu 22 orang jika dipersentasekan memiliki persentase 73,3% dan jumlah anggota legislatif perempuan yaitu 8 orang jika dipersentasekan memiliki persentase 26,7%.

Dari persentase diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif itu sudah memenuhi syarat 30% namun keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif di Kab. Takalar tidak terpenuhi 30% hal ini menunjukkan bahwa perempuan hanya dibutuhkan sebagai persyaratan dalam partai politik untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum legislatif. Namun pada saat masuk dalam legislatif maka jumlah 30% tersebut sudah tidak dipersyaratkan lagi. Hal inilah yang biasa dinamakan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan.



**3). Daftar anggota legislatif perempuan yang telah lolos Dari berbagai partai-partai ke kursi DPRD Kab. Takalar.**

Tabel. 21

Daftar anggota legislatif perempuan yang telah lolos ke kursi DPRD

Kab.Takalar

No	Nama	Partai
1	Ir.Hj. Darmawati	NASDEM
2	Nur Annisa Said, S.H	PKS
3	Melinda Meypayana	PKS
4	Hj. Dawati,SE	PPP
5	Nurazyzyamz Rani	PAN
6	Hj.Erni	PAN
7	Abrianti Nasir, A.Md	HANURA
8	Ir.Husniah Rachman Dg. Tayu	DEMOKRAT

Sumber: KPUD kabupaten Takalar tahun 2019

Dalam pemilihan umum tahun 2019 diketahui bahwa jumlah calon legislatif perempuan adalah 168 orang dari 16 partai yang terbagi atas partai PKB berjumlah 11 orang perempuan, partai GERINDRA berjumlah 11 orang perempuan, partai PDIP berjumlah 9 orang perempuan, partai GOLKAR berjumlah 13 orang perempuan, partai NASDEM berjumlah 11 orang perempuan, partai GARUDA berjumlah 5 orang perempuan, partai BERKARYA berjumlah 12 orang perempuan, partai PKS berjumlah 10 orang perempuan, partai PERINDO berjumlah 11 orang perempuan, partai

PPP berjumlah 13 orang perempuan, partai PSI berjumlah 7 orang perempuan, partai PAN berjumlah 9 orang perempuan, partai HANURA berjumlah 11 orang perempuan, partai DEMOKRAT berjumlah 10 orang perempuan, partai PBB berjumlah 10 orang perempuan, partai PKPI berjumlah 12 orang perempuan. Dan yang lolos hanya 8 orang jadi jumlah calon legislatif yang gugur adalah 160 orang perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C.) FAKTOR PENGHALANG DAN PENDUKUNG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KAB. TAKALAR.**

#### **a.) Faktor penghalang keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar**

IR. Husniah Rachman Dg. Tayu menyatakan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara global yaitu kurangnya kader perempuan dari Partai Politik serta kalah bersaingnya dari laki-laki khususnya dari segi waktu dan dari sisi ketersediaan kos politik<sup>7</sup>

Dari uraian diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghalang perempuan dalam ikut serta dalam pemilihan umum legislatif itu disebabkan karena kurangnya kader perempuan dalam partai-partai politik yang ada di Kab. Takalar

Hj. Erni Alerah Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar menyatakan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara global yaitu kandidat perempuan yang sudah berkeluarga karena jika

---

<sup>7</sup> Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

seorang perempuan yang sudah berkeluarga harus ada izin dari suami ataupun keluarga karena suami biasanya penuh pertimbangan.<sup>8</sup>

Hj. Erni Alerah Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar menyatakan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara pribadi yaitu dari diri sendiri karena tergantung dari niat seorang perempuan apakah ingin mencalonkan atau tidak.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hal yang menyebabkan kurangnya keterwakilan perempuan yaitu adanya izin dari keluarga maupun suami dalam berpolitik sehingga menjadi penghalang bagi perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif.

Nur Annisa Said, SH menyatakan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara global yaitu tidak ada halangan sama sekali jika memang seseorang ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif maka harus siap.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada penghalang bagi siapapun yang ingin ikut serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif baik perempuan ataupun laki-laki hanya saja faktor kesiapan yang menjadi point penting dalam hal ini.

Benati salah satu masyarakat Takalar beranggapan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan yaitu tidak memiliki uang yang banyak serta

---

<sup>8</sup> Erni Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

<sup>9</sup> Erni Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

<sup>10</sup>Nur Annisa Said, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

kurang dikenalnya oleh masyarakat calon legislatif perempuan yang mencalonkan itu.<sup>11</sup>

Rosniah salah satu Tokoh Agama berpendapat bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan yaitu pertama tidak diberikannya izin oleh suaminya untuk berpolitik apabila ia sudah menikah, serta kurang menariknya perhatian perempuan dikalangan masyarakat desa untuk jadi seorang pemimpin.<sup>12</sup>

Rosmini salah satu Tokoh Masyarakat beranggapan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan yaitu kurang beradaptasi bersama masyarakat sehingga tidak dikenal, kurangnya dana politik yang dimiliki, dan tidak adanya keberuntungan yang berpihak kepadanya.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas khususnya dari ke 3 Tokoh Narasumber tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghalang keterwakilan perempuan yaitu kurangnya dana politik yang mereka miliki, tidak adanya izin dari keluarga dan suami dan tidak dikenalnya calon perempuan yang ikut serta tersebut.

#### **b.) Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan di DPRD Kab. Takalar.**

IR. Husniah Rachman Dg. Tayu bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara Global yaitu:<sup>14</sup>

1. Figur
2. Keluarga
3. Kinerja Anggota DPRD perempuan di periode sebelumnya yang cukup bagus

---

<sup>11</sup>Benati, Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.

<sup>12</sup>Rosniah, Tokoh Agama, Wawancara, Takalar, 10 Februari 2020.

<sup>13</sup>Rosmini, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.

<sup>14</sup>Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019

4. Citra Anggota DPRD perempuan di periode sebelumnya yang cukup bagus sehingga lebih mudah menjual perempuan sebagai calon legislatif Serta faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara pribadi dari IR. Husniah Rachman Dg. Tayu untuk bertahan dan tetap terpilih yaitu selalu menjaga elektabilitas bukan hanya sekedar pencitraan media tapi melalui kerja-kerja langsung.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan yaitu adanya dukungan dari keluarga serta telah menjadi figur yang baik bagi masyarakat setempat sehingga dapat dipilih dan terpilih kembali.

Hj. Erni Alerah Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara Global yaitu mengatakan bahwa: menurut saya hampir sama dengan ibu husniah Rachman yaitu seorang figur karena bila mana ada kandidat perempuan yang sudah menjabat 1 periode maka itu menjadi dasar kandidat perempuan dapat di pilih oleh masyarakat karena dilihat dari kinerja sebelumnya dalam menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Takalar.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa figurlah yang dapat menjadi faktor pendukung yang paling utama untuk dapat dipilih dan terpilih menjadi anggota legislatif.

Nur Annisa Said, SH bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Erni Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

<sup>16</sup>Nur Annisa Said, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

1. Dukungan dari Partai politik
2. Skill Kandidat perempuan
3. Kemauan dari diri sendiri
4. Mampu dalam segala hal tentang kerjaan sebagai anggota DPRD.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan yaitu adanya dukungan dari partai politik yang mengusung calon dan yang paling penting yaitu kemauan dari orang yang ingin mencalonkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif tersebut.

Benati salah satu masyarakat Takalar beranggapan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan yaitu adanya uang yang banyak serta sudah memiliki pengaruh besar bagi masyarakat yang memilih, adanya kemauan dari diri sendiri untuk mencalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>17</sup>

Rosniah salah satu Tokoh Agama menyatakan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan diranah politik yaitu adanya dukungan dari suami, adanya dukungan dari keluarga dan kemauandiri sendiri merupakan faktor yang paling mendukung.<sup>18</sup>

Rosmini salah satu Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan yaitu adanya dana politik, dukungan dari masyarakat memadai sehingga ia berani mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Takalar<sup>19</sup>

Dari uraian diatas khususnya dari ke 3 Tokoh Narasumber tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi pendukung keterwakilan

---

<sup>17</sup>Benati, Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.

<sup>18</sup>Rosniah, okoh Agama, Wawancara, Takalar, 10 Februari 2020.

<sup>19</sup>Rosmini, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020

perempuan yaitu adanya dana politik yang dimiliki para calon kandidat serta adanya dukungan dari pihak keluarga dan dukungan dari masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa dalam keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif memiliki peluang dan tantangan bagi mereka yaitu:

Tabel 21

Peluang dan tantangan dalam keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif.

NO	PELUANG	TANTANGAN
1.	Adanya dukungan dari UU	Hambatan sosial budaya
2.	Struktur politik yang memberikan ruang bagi perempuan	Struktur ketimpangan politik
3.	Pergeseran paradigma masyarakat menjadi pemikir inklusif dan elegan	Sumber daya keuangan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Ada beberapa hal yang akan disimpulkan, yaitu :

1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar yaitu Berjumlah 30 orang dan diantara 30 orang tersebut jumlah keterwakilan perempuan dalam ranah DPRD yaitu 8 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam periode-periode sebelumnya tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di DPRD Kab. Takalar itu sudah mulai mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari dari jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah pemilih laki-laki serta adanya kesadaran perempuan untuk memilih sesama perempuan.
2. Faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Takalar yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kader perempuan dari Partai Politik yang ingin menjadi calon legislatif. Serta kurangnya keinginan perempuan untuk berkiprah di ranah politik dan Faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Takalar itu disebabkan karena adanya aturan dari Undang-Undang yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam Partai Politik yaitu 30% dalam hal perekrutan untuk menjadi calon legislatif serta partai-partai juga tidak dapat membedakan antara keduanya yaitu perempuan dan laki-laki dalam pencalonan karena hal yang penting yaitu mereka harus mempunyai *skill* masing-masing serta memiliki potensi suara yang banyak dan ingin bekerja untuk Partai



Politiknya serta berka kepada masyarakat dan dukungan besar dari jumlah pemilih perempuan yang jauh lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Perempuan seharusnya dapat menyadari dan memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya serta peluang besar yang mereka miliki untuk ikut serta ke ranah politik demi untuk memperjuangkan Hak-hak kaum perempuan karena sangatlah penting jika seorang perempuan dapat duduk di kursi legislatif.
2. Seharusnya Partai Politik dalam hal perekrutan untuk menjadikan kadernya sebagai calon legislatif harus betul-betul karena kader tersebut mampu bukan karena hanya untuk memenuhi kuota 30 % yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang serta hanya untuk menjadi syarat untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum legislatif dan pada saat masuk sudah tidak dipersyaratkan lagi. Karena dalam perekrutan calon legislatif Partai Politik harus mengedepankan potensi suara yang dimiliki serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon legislatif tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Anonym, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Puwokerto: STAIN Press, 2014.
- Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Bhasin dan Khan, *persoalan pokok mengenai feminisme dan relevansinya*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1995.
- Cholisn dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Ery Iswary, *Perempuan Makassar Relasi Gender Dalam Folklore*, Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- H.Zaeniasyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Henry Subiakto dan Rachmah ida, *komunikasi politik, media dan demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kadariusman, *Agama, relasi dan feminism*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005. h.27.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Muldjono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Riant Nugroho, *Gender dan strategi pengarus-utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Rozali abdullah, *mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010.

Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Tri Lisiani Prihatinah, *Hukum dan kajian Gender*, Semarang: Badan penerbit universitas diponegoro, 2010.

#### SUMBER LAINNYA

Dian Pratiwi, Hubungan Politik Calon Legislatif dengan Konstituen pada Dapil 4 Kecamatan Manggala Panakkukang Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2014, , h. 15-17. Repository .unhas. ac. id. (Diakses 20 November 2016).

Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan Studi Pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan, h. 135. Repositori.uin-Alauddin.ac.id (Diakses 16 Juni 2020).

Fatmawati, Muhammad Shuhufi, *women's political rights in Islamic law perspective (analysing the implementation in Indonesia political system)*, h.3.

<http://id.m.wikipedia.org>

Jumadi, penguatan fungsi pengawasan DPD RI dalam sistem bikameral parlemen. journal yurisprudentie: volume 6 nomor 1 Juni 2019.

Nuni silvana, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif, 2013, h. 13.repository.universitas jenderal soedirman Purwokerto.ac.id.(diakses 12 desember 2018).

St. Muflihah rahmah, pelaksanaan undang-undang partai politik terhadap keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten sinjai, 2014, h. 14 repository uinam.ac.id (diakses 5 januari 2019).

UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.





**LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong Gowa  
Tlp (0411) 841879, Fax (0411) 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Nomor : 340 Tahun 2019  
T E N T A N G  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserah tugas sebagai Dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Andi Syafriani, M.H.
2. ST. Nurjannah, S.H., M.H

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Adelina Kadir  
NIM : 10400116012  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar"

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



: Samata Gowa  
: 20 Oktober 2019

Muhammad Muhammad Bakry

Tembusan :  
Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 26388/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kelua DPRD Kab. Takalar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3815/SH 0.1/PP.00.9/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ADELINA KADIR**  
Nomor Pokok : **10400116012**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**  
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KAB. TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl **03 Desember 2019 s/d 03 Januari 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 03 Desember 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A.M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Ponggal.

SMAP PTSP 04-12-2019



Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tj. (0411) 864028-864030 Fax. 864023  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B <sup>3815</sup> /SH.01/PP.00.9/12/2019

Romang Polong, 2 Desember 2019

Sifat : Penting

Lamp : Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth :  
Dinas Penanaman Modal Daerah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan Prov. Sul-Sel.  
di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang  
tersebut di bawah ini :

Nama : Adelina Kadir  
Nim : 10400116012  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Hamzah Dg. Tuppu Takalar

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai  
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.. dengan judul skripsi :

**"Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif  
di Kab. Takalar)."**

Dosen Pembimbing :  
1. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.  
2. St. Nurjannah, S.H., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang  
bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di Kantor DPRD Kab.  
Takalar, terhitung mulai tanggal 3 Desember 2019 s.d. 3 Januari 2020

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dr. H. Muammer Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
Nip. 19731122 200012 1 002

Tembusan:  
Yth Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa  
(Sebagai Laporan)





**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
*Jalan Jenderal Sudirman Nomor Telp. (0418) 21194 Takalar*

Takalar, 17 Desember 2019

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 800/ 272/Set-DPRD/XII/2019

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3815/SH.0.1/PP.00.9/12/2019 tanggal 02 Desember 2019, Perihal Izin Penelitian menerangkan bahwa :

Nama : **ADELINA KADIR**  
Alamat : Jl. H. M Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa  
Pekerjaan : Mahasiswa (SI) UIN Alauddin Makassar

Telah memenuhi persyaratan dan selesai meneliti sebagaimana Jadwal yang ditetapkan dengan judul skripsi yang diajukan :

**" IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF DI KAB. TAKALAR"**

Demikian surat pengantar ini disampaikan untuk diketahui seperlunya.

A.n : **SEKRETARIS DPRD KAB. TAKALAR**  
Kepala Bagian Umum  
  
**H. HASIAH, SE. MM**  
Pangkat Pembina TK.I, IV/b  
Nip. 19681231 199003 2 030

WAWANCARA DENGAN IBU WAKIL KETUA DPRD KAB. TAKALAR IBU  
Hj. ERNI HALERAH



WAWANCARA DENGAN IBU IR HUSNIAH RACHMAN DG TAYU  
ANGGOTA DPRD KAB.TAKALAR YANG SUDAH MENJABAT 2 PERIODE



WAWANCARA BERSAMA KAK NUR ANNISA SAID, SH ANGGOA DPRD  
KAB. TAKALAR TERMUDA



## RIWAYAT HIDUP



**Adelina Kadir** , lahir di Paddinging 15 Agustus 1998, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan **Abd. Kadir** dan **Benati**. Bertempat tinggal di Kabupaten Takalar. Penulis mengenyam pendidikan pertama di SDN. 228 Borong Untia pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan di

SMPN 1 Mappakasunggu pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 3 Takalar pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berkat karunia Allah Swt penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan skripsi yang berjudul “**Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kab. Takalar.**”